

## ABSTRAK

Chairullah Firdaus<sup>1</sup>  
Cut Elidar, S.H.,M.H.<sup>2</sup>  
Vivi Hayati, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pengaturan hukum terhadap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Bagian yang menjadi hal terpentingnya adalah keluarga yang ditelantarkan terdapat istri dan anak. Kedua hal tersebut seharusnya menjadi hak kepala keluarga untuk memberikan perlindungan, merawat, menjaga, menjamin kesejahteraan, tetapi realitanya keluarga tersebut ditelantarkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara. Adalah suatu keharusan memberikan fasilitas kemudahan kepada mereka yang mengalami masalah sosial ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tanggung jawab Dinas Sosial terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga, perlindungan hukum terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga, hambatan dan upaya Dinas Sosial terhadap orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (library research) sebagai data pelengkap.

Hasil dari penelitian penulis, pada kasus penelantaran yang terjadi di Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur. Keluarga yang ditelantarkan bertahun-tahun lamanya belum ada penanganan secara khusus oleh Dinas Sosial.. Di Aceh Timur terdapat panti sosial untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam 1 tahun hampir 60 kasus penelantaran, sehingga fasilitas belum cukup untuk menerima semua korban penelantaran. Seharusnya itu menjadi keharusan negara untuk menjaga, merawat orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Upaya selanjutnya Dinas Sosial dalam menangani kasus tersebut memiliki program Usaha Ekonomi Kreatif (UEK) yang dapat membantu perekonomian keluarga yang ditelantarkan pada kasus ini. Tapi kenyataannya Dinas Sosial belum memiliki cukup anggaran untuk dapat menjalankan program sepenuhnya.

Disarankan kepada penyelenggara pelayanan pengaduan lebih khususnya Dinas Sosial agar memenuhi hak-hak warga negara, karena itu merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin kesejahteraannya. Kepada keluarga yang ditelantarkan untuk dapat langsung mengajukan pengaduan kepada Dinas Sosial ataupun pihak terkait dengan Dinas Sosial.

***Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dinas Sosial, Ditelantarkan.***

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua